

LAPORAN TRIWULAN I – TPID TAHUN 2025

Pengendalian Inflasi Provinsi NTT



Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT

Laporan Triwulan I
Pengendalian Inflasi Provinsi NTT

I. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNNYA DAN JASA SERTA RESIKO KEDEPAN.

Janauri 2025 -0,06 % (Y-on-Y), -0,27 % (M-to-M)

Februari 2025 0,47 % (Y-on-Y), 0,37 % (M-to-M)

Maret 2025 1,86 % (Y-on-Y), 1,24 % (M-to-M)

- Inflasi Tahunan Provinsi NTT Bulan Januari 2025 Y-on-Y adalah sebesar -0,06% adalah DEFLASI terdalam sejak bulan Juni 2022, berada di bawah target rentang sasaran ($2,5\pm 1\%$) dan juga berada di bawah angka inflasi Nasional yaitu 0,76%, serta menjadi urutan ke 7 Provinsi terendah secara Nasional. Perhitungan IHK pada 5 wilayah di Provinsi NTT Bulan Januari 2025 Y-on-Y adalah:

1) Kota Kupang (0,08%),

2) Maumere (0,97%),

3) Waingapu (1,35%), mencerminkan Inflasi Urban dan,

4) Kabupaten Ngada (-0,33%),

5) Kabupaten TTS (-0,84%), mencerminkan Inflasi Urban dan Inflasi Rural.

INFLASI Tertinggi ada di Waingapu sedangkan DEFLASI terdalam di Kab TTS.

- Inflasi Tahunan Provinsi NTT Bulan Februari 2025 Y-on-Y mengalami INFLASI sebesar 0,47% berada lebih tinggi dari bulan Januari yang mengalami deflasi -0,06%, masih berada di bawah target rentang sasaran ($2,5\pm 1\%$) namun berada di atas angka inflasi Nasional yaitu -0,09%. Untuk pertama kali sejak 8 bulan terakhir NTT masuk ke dalam 10 besar inflasi tertinggi tingkat nasional dan menjadi urutan ke 9. Perhitungan IHK pada 5 wilayah di Provinsi NTT Bulan Februari 2025 Y-on-Y adalah: -

1) Kota Kupang (0,01%),

2) Maumere (1,68%)

3) Waingapu (1,52%), mencerminkan Inflasi Urban dan,

4) Kabupaten Ngada (0,22%)

5) Kabupaten TTS (1,09%), mencerminkan Inflasi Urban dan Inflasi Rural.

INFLASI Tertinggi ada di Maumere sedangkan Kab TTS yang selama beberapa bulan ini mengalami deflasi, mulai menuju ke angka target rentang sasaran.

- Pada Maret 2025 terjadi inflasi y-on-y Provinsi NTT sebesar 1,86% dengan IHK sebesar 107,82. Inflasi tertinggi terjadi di Maumere sebesar 4,25% (IHK 109,65) dan Inflasi terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 1,19% (IHK 107,03) yang dapat dilihat sebagai berikut : Perhitungan IHK pada 5 wilayah di Provinsi NTT Bulan Maret 2025 Y-on-Y adalah:

1) Kota Kupang (1,19%),

2) Maumere (4,25%)

3) Waingapu (2,77%), mencerminkan Inflasi Urban dan,

4) Kabupaten Ngada (2,17%)

5) Kabupaten TTS (2,52%), mencerminkan Inflasi Urban dan Inflasi Rural.

6) INFLASI Tertinggi ada di Maumere, terendah di Kota Kupang.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

1. Kendala yang dihadapi

- Produktivitas pertanian yang belum optimal : Produktivitas padi di NTT sebesar 4,62% masih dibawah Bali 6,27%, NTB 5,34%, dan Nasional 5,31% .

- Luas lahan pertanian menurun tiap tahun hingga -2,73 %
- Ketergantungan Provinsi NTT terhadap pasokan beras dari luar dapat terlihat melalui konsumsi beras Provinsi NTT sebesar 149,49 ribu Ton/Triwulan dimana di kota kupang sendiri membutuhkan pasokan beras sebesar 12,55 ribu Ton/Triwulan, sehingga devisa beras di Provinsi NTT paling tidak mencapai 72,32 ribu Ton tercatat pada Triwulan IV tahun 2024.

2. Klasifikasi permasalahan :

a) Ketersediaan pasokan :

- Pola Inflasi NTT

Beras :

- a. Sebagian besar pasokan beras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Sulsel, NTB, Jatim dan Import.

Ikan-Ikanan

- a. Konsumsi ikan di NTT cukup tinggi sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi secara keseluruhan.

Hortikultura

- a. Komoditas hortikultura seperti tomat, cabai, dan bawang, memberi andil inflasi.
- b. Komoditas hortikultura sayuran seperti pucuk labu, terong sebesar, bunga pepaya, kol putih, kangkung, sawi, dan kangkung memberikan andil inflasi, dimana sebagian besar diproduksi oleh petani lokal NTT.

Daging Ayam :

- a. Komoditas Daging ayam dan Telur ayam turut memberi andil deflasi.

b) Keterjangkauan harga :

- Berdasarkan data rilis BPS Prov.NTT, Provinsi NTT mengalami Kontraksi harga pada komoditas-komoditas tertentu awal tahun (Januari — Maret) yang diakibatkan adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah dan menjelang momen Ramadhan/Idulfitri dan Idul Adha sehingga memicu terjadinya Deflasi/Inflasi. Sehingga deflasi/Inflasi tertinggi dalam tahun berjalan, dipicu oleh momen pasca/menjelang Hari Besar Keagamaan.
- Komoditas yang sering kali menjadi faktor utama deflasi/inflasi di NTT sebagian besar berasal dari kelompok *Volatile Foods*, antara lain beras, daging dan telur ayam ras, bawang merah dan putih, cabai merah dan rawit, ikan kembung dan tongkol. Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga memiliki bobot yang besar terhadap perhitungan inflasi serta kelompok AP terutama angkutan udara
- permasalahan yang dihadapi antara lain produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) di NTT yang rendah di bawah nasional sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari luar daerah.

c) Kelancaran distribusi :

- Pemetaan menggunakan *Global Neighboring Area* untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan berbeda terhadap inflasi NTT. Wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua memiliki dampak langsung terhadap inflasi di NTT. Sementara itu, wilayah lainnya memiliki dampak tidak langsung melalui perantara atau faktor lain.
- Tarif Angkutan Udara
 - Kondisi geografis NTT yang terdiri dari kepulauan membuat penerbangan menjadi moda transportasi utama intra provinsi
 - Maskapai yang beroperasi masih terbatas dan cenderung didominasi oleh satu maskapai.

d) Komunikasi efektif :

- Adanya koordinasi dari berbagai *stakeholder* terkait tentang pentingnya pengendalian inflasi secara kontinyu namun perlu dioptimalkan.

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH
Upaya Pengendalian Inflasi oleh Provinsi NTT, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT (TPID NTT) berupa kegiatan melakukan pengendalian Inflasi diantaranya:

- 1) TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri secara hybrid setiap setiap minggu.
- 2) 23 Januari 2025 TPID Provinsi NTT melaksanakan Rapat Teknis pengendalian inflasi di Provinsi NTT dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang.
- 3) 25 Februari 2025 Audiens TPID Provinsi NTT dengan Ketua Sinode GMIT terkait Kolaborasi bersama Pemda dalam pengendalian inflasi melalui kegiatan-kegiatan Hilirisasi komoditas Volatile Food yang memicu Inflasi.
- 4) 28 Februari 2025 TPID NTT memantau pelaksanaan Operasi Pasar di Area lokasi Kantor POS dan Giro Jln. Palapa yang dilaksanakan secara Nasional di seluruh Provinsi
- 5) 5 Maret 2025 TPID NTT melaksanakan High Level Meeting (HLM) Dalam rangka mengantisipasi ketersediaan stok dan stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok menjelang dan menghadapi HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) bulan suci Ramadhan, Idul Fitri 1446 H dan Paskah tahun 2025.
- 6) 11 Maret 2025 TPID NTT melaksanakan Sidak Pasar, dengan lokasi Pasar Pasar Oeba dan Oebobo.
- 7) 21 Maret 2025 TPID NTT melaksanakan Rapat Teknis TPID Dalam rangka Hilirisasi Pengolahan Komoditas Pemicu Deflasi yang berkontribusi bagi terkendalinya inflasi di Provinsi NTT dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang.

IV. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

1. Berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota se NTT kurun waktu Januari 2025 s/d Maret 2025 sudah sesuai (On The Track) sehingga tercatat perkembangan inflasi YoY Provinsi NTT ke arah yang lebih baik yaitu :

Januari 2025 -0,06 % (Y-on-Y), -0,27 % (M-to-M)

Februari 2025 0,47 % (Y-on-Y), 0,37 % (M-to-M)

Maret 2025 1,86 % (Y-on-Y), 1,24 % (M-to-M)

Sehingga kegiatan-kegiatan seperti Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Bersubsidi dan Non Subsidi tersebut tetap dan akan dilaksanakan pada waktu – waktu selanjutnya.

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH:

High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi NTT tanggal 5 Maret 2025 menghasilkan 13 (tiga belas) butir rekomendasi sebagai berikut:

1. **Pembentukan SATGAS Pengendalian Inflasi NTT** yang bertugas antara lain untuk memverifikasi keadaan yang sesungguhnya, memberi arahan, penguatan kepada pelaku ekonomi, pelaku pasar untuk secara bersama sama bertanggung jawab mengendalikan inflasi daerah;

2. Mendorong **Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen** (berupa tanaman bahan makanan/hortikultura) untuk mendukung ketersediaan stok pangan yang berbasis kebutuhan pasar dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan kebun masyarakat sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi;
3. Mendorong **percepatan hilirisasi** produksi pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi aneka produk turunan seperti, sambal, saus tomat, dendeng, se'i, bakso, abon dan lain-lain untuk meningkatkan *added value* dan mewujudkan *One Village One Product* (OVOP);
4. Memfasilitasi dan mendukung **pemanfaatan penerapan teknologi** pengolahan yang tepat guna sehingga proses produksinya modern, efisien dan setiap produk memenuhi standar sehat;
5. Memastikan **pasar yang menyerap produk-produk masyarakat** dan atau menghubungkan produsen, off-taker, dan konsumen untuk membeli setiap produk secara kontinyu;
6. Memitigasi **dampak perubahan iklim** sehingga penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan dapat dihindari supaya tidak merugikan produsen;
7. Perlu **mendorong generasi melinial dan generasi Z** secara sistematis agar mau menjadi petani, peternak dan nelayan modern;
8. Pemanfaatan **Dana Desa yang tepat sasaran**, untuk mendukung Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok masyarakat yang ada di 3.137 Desa di Provinsi NTT dengan mengoptimalkan peran dan fungsi BUMDes;
9. Bulog Provinsi NTT agar terus melaksanakan **penyerapan Beras Lokal** yang diproduksi oleh petani di NTT dengan harga yang memadai;
10. Meningkatkan **akses keuangan bagi pelaku usaha** Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan melalui program Kredit Merdeka oleh Bank NTT, dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) oleh Himpunan Bank Negara (Himbara), Bank Swasta dan Lembaga Keuangan bukan Bank;
11. Implementasi **digitalisasi PKB** dan memberikan insentif sebagai *sweetener* bagi Wajib Pajak yang menyetor melalui kanal digital;
12. Implementasi **digitalisasi Retribusi Parkir** dan Rekreasi dan memberikan insentif sebagai *sweetener* bagi Wajib Retribusi yang menyetor melalui kanal digital;
13. **Mendorong Koperasi** Simpan Pinjam agar lebih memberdayakan usaha usaha pada sektor Riil / Sektor Produktif, dengan model inkubasi dan non inkubasi.

Kupang, April 2025

Plt. KEPALA BIRO
PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NTT,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM

Pembina Tk.I

NIP. 197004271990031005